

# MODEL DEMOKRASI PARLEMENTER WESTMINSTERINGGRIS: PENERAPAN PRINSIP DEMOKRASI PARLEMENTER WESTMINSTER DALAM KONTEKS DEMOKRASI INDONESIA

Putri Juniyo<sup>1</sup>,Ario Pamungkas<sup>2</sup>, Adinda Faradila Intan Permata Sari<sup>3</sup>,Marsya Putri A.S<sup>4</sup>,  
Hegel Vilcinsky<sup>5</sup>  
Universitas Esa Unggul, Jakarta  
email :[m33535504@student.esaunggul.ac.id](mailto:m33535504@student.esaunggul.ac.id)

## **Abstract**

*This article examines the Westminster parliamentary democracy model and how its principles can be applied in the context of Indonesian democracy. The Westminster system, rooted in British parliamentary tradition, is known for its balance between the executive and legislature, as well as its effective checks and balances mechanisms. This study analyzes key elements of the system, such as elections, political party roles, the relationship between parliament and government, and the oversight function. Additionally, the article identifies the challenges faced by Indonesia in adopting these principles, given the historical, social, and cultural differences. The research aims to provide recommendations on how Indonesia can strengthen its democratic system by drawing inspiration from the Westminster model, fostering a more efficient and accountable government.*

**Keywords:** Westminster parliamentary democracy, Indonesian democracy, Executive and legislature balance, elections

## **Abstrak**

Artikel ini membahas model demokrasi parlementer Westminster Inggris dan bagaimana prinsip-prinsipnya dapat diterapkan dalam konteks demokrasi Indonesia. Sistem Westminster, yang berakar pada tradisi parlementer Inggris, terkenal dengan keseimbangan antara eksekutif dan legislatif, serta mekanisme checks and balances yang efektif. Penelitian ini menganalisis elemen-elemen penting dalam sistem ini, seperti pemilihan umum, peran partai politik, hubungan antara parlemen dan pemerintah, serta fungsi pengawasan. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengadopsi prinsip-prinsip ini, mengingat perbedaan sejarah, sosial, dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana Indonesia dapat memperkuat sistem demokrasinya dengan mengambil inspirasi dari model Westminster, untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel.

**Kata Kunci:** Demokrasi parlementer Westminster, Demokrasi Indonesia, Keseimbangan eksekutif dan legislative, Pemilihan umum

## PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, dimana keputusan-keputusan politik diambil melalui proses perwakilan yang terbuka dan akuntabel. Salah satu model demokrasi yang paling dikenal di dunia adalah sistem demokrasi parlementer Westminster yang berasal dari Inggris. Sistem ini mengedepankan keseimbangan antara eksekutif dan legislatif, serta mengutamakan mekanisme checks and balances yang berfungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Sebagai negara dengan sejarah panjang dalam penerapan sistem parlementer, Inggris menjadi acuan penting dalam membangun dan memperkuat demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Namun, meskipun Indonesia telah menerapkan sistem demokrasi parlementer sejak masa awal kemerdekaannya, adaptasi prinsip-prinsip Westminster dalam konteks Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Berbeda dengan Inggris, Indonesia memiliki latar belakang sosial, budaya, dan sejarah yang sangat berbeda, yang tentunya mempengaruhi penerimaan dan implementasi model demokrasi ini. Dalam konteks tersebut, penting untuk mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip demokrasi parlementer Westminster dapat diterapkan secara efektif di Indonesia, dengan

mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan khusus bangsa ini.

Artikel ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis model demokrasi parlementer Westminster serta bagaimana prinsip-prinsipnya dapat diterapkan dalam konteks demokrasi Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah pada elemen-elemen penting dalam sistem Westminster, seperti pemilihan umum, peran partai politik, hubungan antara parlemen dan pemerintah, serta fungsi pengawasan. Dengan memahami tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengadopsi sistem ini, diharapkan makalah ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat sistem demokrasi Indonesia dan mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel.

## PEMBAHASAN

Model Demokrasi Parlementer Westminster Inggris: Penerapan Prinsip Demokrasi Parlementer Westminster dalam Konteks Demokrasi Indonesia.

### **1. Sejarah singkat sistem Westminster**

Seperti sistem pemerintahan lainnya sistem Westminster punya sejarah yang sangat panjang dimulai dari Magna Carta pada tahun 1215 yang kemudian berevolusi pada petition of right pada tahun 1628 dan kemudian

akhirnya tiba pada bill of right pada tahun 1689.

Dari sejarahnya kita dapat mengetahui bahwa Inggris mempunyai tradisi yang sangat kuat terhadap demokrasi (lebih spesifiknya model demokrasi Westminster) dan ini membuat parlemen Westminster sebagai salah satu parlemen tertua di dunia dan bahkan menjadi inspirasi bagi negara lain salah satu contohnya yang paling terkenal (dan mungkin mengagetkan bagi beberapa orang) adalah Amerika Serikat itu sendiri di konstitusi mereka Terkhususnya Magna Carta

## 2. Sistem Westminster dan Penerapannya dalam Sistem Demokrasi Indonesia

Sistem Westminster adalah sistem pemerintahan parlementer yang berasal dari Inggris. Nama "Westminster" merujuk pada Istana Westminster di London, tempat parlemen Inggris berkantor, yang juga menjadi simbol dari sistem pemerintahan ini. Sistem ini menekankan pada prinsip pemisahan kekuasaan, *checks and balances*, serta peran sentral parlemen dalam pengambilan keputusan politik dan pembuatan undang-undang. Sistem ini diterapkan di berbagai negara, terutama bekas koloni Inggris, seperti Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Ciri-ciri Sistem Westminster:

- a. Parlemen Bikameral: Terdiri dari dua kamar, yaitu Majelis Rendah (*House of Commons*) dan Majelis Tinggi (*House of Lords*). Majelis Rendah memainkan peran dominan

dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan pemerintah.

- b. Pemisahan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan: Kepala negara (raja atau ratu) memiliki peran seremonial, sementara kepala pemerintahan (Perdana Menteri) menjalankan fungsi eksekutif.
- c. Pertanggungjawaban Kolektif Kabinet: Kabinet bertanggung jawab secara kolektif kepada parlemen dan harus mempertahankan kepercayaan mayoritas di Majelis Rendah.
- d. Pemilihan Umum dan Sistem Partai: Sistem ini biasanya memiliki dua partai utama yang bersaing dalam pemilihan umum. Partai yang memenangkan mayoritas kursi di Majelis Rendah membentuk pemerintahan, sementara partai oposisi mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. (Catatan: akhir-akhir ini di politik inggris sistem (atau mentalitas) dua partai ini sedang diguncang dengan popularitas partai Reformasi Inggris dengan Nigel Farage (terkenal atas perannya di partai UKIP dan Brexit pada 2016) dan saat ini mempunyai 4 kursi di parlemen Inggris sementara itu partai liberal demokrat masih bertahan dan meskipun jumlahnya sedikit di parlemen namun merek perannya cukup

penting seperti di 2010 contohnya dimana ada koalisi antara partai konservatif (salah satu dari 2 partai utama di Inggris selain Partai Buruh) pimpinan David Cameron dan Partai Liberal Demokrat)

- e. *Checks and Balances*: Meskipun tidak memiliki konstitusi tertulis, Inggris menerapkan mekanisme *checks and balances* melalui pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

De smith menyatakan bahwa transplantasi-selektif terhadap sistem parlementer Westminster dapat dilakukan Untuk negara dengan sistem presidensial. Sehingga dengan kata lain kita tidak perlu merombak total sistem pemerintahan kita sama persis seperti Inggris dengan hanya menggunakan Perdana Menteri namun cukup sistem Parlemennya saja yang perlu diubah namun kekuasaan sang presiden tidak usah diubah/status quo

### 3. Penerapan dalam Sistem Demokrasi Indonesia

Indonesia mengadopsi sistem demokrasi presidensial, yang berbeda dengan sistem parlementer seperti Westminster. Namun, ada beberapa elemen yang mencerminkan prinsip-prinsip Westminster dalam praktik demokrasi Indonesia, meskipun dengan penyesuaian sesuai konteks nasional.

- a. Parlemen Bikameral: Indonesia memiliki sistem

parlemen bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai majelis rendah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai majelis tinggi. DPR memiliki kekuatan lebih besar dalam pembuatan undang-undang, mirip dengan Majelis Rendah dalam sistem Westminster.

- b. *Checks and Balances*: Indonesia juga menerapkan prinsip *checks and balances* antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak berasal dari parlemen, tetapi tetap harus bekerja sama dengan DPR untuk menjalankan pemerintahan.

- c. Sistem Partai: Dalam pemilihan umum, partai-partai politik di Indonesia berperan besar dalam menentukan kebijakan pemerintah, meskipun sistemnya lebih *multiparty* dibandingkan dengan sistem dua partai yang lazim dalam Westminster.

- d. Pertanggungjawaban Pemerintah: Meskipun kabinet Indonesia tidak bertanggung jawab langsung kepada parlemen seperti dalam sistem Westminster, presiden dan menteri-menteri tetap diawasi oleh DPR, yang dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat untuk mengontrol kebijakan pemerintah.

Dalam sistem demokrasi Indonesia, meskipun ada beberapa perbedaan mendasar dengan sistem Westminster, seperti bentuk pemerintahan presidensial dan pemilihan langsung presiden, prinsip-prinsip demokrasi dan pengawasan terhadap kekuasaan tetap dijalankan dengan mengadaptasi elemen-elemen yang relevan dari berbagai sistem, termasuk Westminster.

Sehingga jika kita ingin mengreformasi sistem kita yang ada di senayan serupa dengan apa yang diterapkan di Westminster sebaiknya kita menerepkan mereka secara selektif agar selaras dengan sistemnya kita tanpa mengurangi sisi positifnya dan tentunya tidak berbenturan yang berakibatkan efek yang fatal seperti disfungsi

## KESIMPULAN

Model demokrasi parlementer Westminster mengedepankan prinsip keseimbangan kekuasaan, *checks and balances*, serta peran partai politik dalam pemerintahan. Meskipun Indonesia mengadopsi sistem presidensial, beberapa elemen dari sistem Westminster, seperti parlemen bikameral dan pengawasan oleh DPR, tetap relevan dalam konteks Indonesia. Meskipun ada tantangan terkait perbedaan sosial, budaya, dan sejarah, penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat memperkuat demokrasi Indonesia, menciptakan pemerintahan

yang lebih efisien dan akuntabel dengan penyesuaian yang tepat.

Kami sangat yakin bahwa model Westminster akan cocok di Indonesia mengingat ada banyak kesamaan seperti faktanya bahwa Inggris itu negara kesatuan (yang tentunya dibawah sebuah sistem monarki berbeda dengan Indonesia yang berpangkuhan dengan dasar sistem republik) Dan mereka juga berkomitmen dengan desentralisasi (yang dimana di politik Inggris namanya Devolusi) dan tentunya di Inggris juga ada suku bangsa seperti orang Wales, Skotlandia dan Irlandia sehingga mereka harus menjaga “kebhinekaan” mereka seperti kita menjaga kebhinekaan kita dari sabang sampai merauke

## SARAN

Saran untuk Indonesia adalah terus mengadaptasi elemen-elemen sistem Westminster yang sesuai, seperti meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap pemerintah dan memperkuat peran parlemen. Selain itu, perlu adanya upaya untuk menyelaraskan sistem politik dengan karakteristik lokal agar dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Tak hanya itu saja namun sistem kepartaian kita juga harus dinamis dengan mengacu kepada partisanship (sikap rasa setia kepada partai) karena jika kita lihat di Inggris demokrasi

mereka sehat dan subur karena adanya rasa partisanship yang kemudian memicu diskusi dan perdebatan yang secara langsung atau tidak langsung memperkuat sendi demokrasi mereka

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Mirza, S., Buana (2023). *Menggagas Pengawasan Badan Perwakilan Dalam Kabinet Presidensial: Perspektif Perbandingan Hukum*

Rahman, D., Azlan (2024). *Penerapan Konsep Open dalam Mewujudkan Parlemen yang Modern: Studi pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*

Tempo.co. (2022). *Sistem Pemerintahan Inggris yang Perlu Anda Ketahui*